

Siaran Pers

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Akses dan Pemanfaatan Data Kesehatan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan tentang “Akses dan Pemanfaatan Data Kesehatan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional” pada Selasa (18/10) di Ruang Rapat Utama, Gedung Widjojo Nitisastro, Bappenas. Nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek.

Diharapkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, dapat semakin memperlancar kerjasama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan terutama dalam hal pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi yang ada di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional yang didasarkan pada bukti-bukti yang valid, akurat, dan terkini.

Nota kesepahaman ini merupakan salah satu upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk memanfaatkan dengan lebih optimal berbagai data hasil riset maupun data capaian pembangunan yang dihasilkan oleh K/L termasuk Kementerian Kesehatan, sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menekankan bahwa dengan adanya pendekatan pembangunan berdasarkan program (*money follow program*), peran data sangat penting terutama untuk menentukan skala prioritas kegiatan dan perhitungan target sasaran yang akan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran.

Salah satu bentuk dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah terbukanya akses terhadap dataset survei-survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes), dan Riset Kesehatan Tahunan yang akan mendukung penguatan kapasitas Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ke depan, dengan adanya akses data tersebut, penetapan angka dasar (*baseline*) dan perhitungan proyeksi target pembangunan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi, tidak hanya di tingkat nasional tetapi sampai dengan tingkat daerah. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga dapat memanfaatkan berbagai hasil kajian kebijakan strategis yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan strategis di sektor kesehatan.

Selanjutnya, Nota Kesepahaman tersebut akan dituangkan lebih teknis melalui Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Hadir dalam acara ini para pejabat Eselon I dan Eselon II dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Jakarta, 18 Oktober 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650;
Faksimile (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id